BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara benar dan jujur tanpa ada yang harus disembunyikan. Menurut Qonitin dan Yudowati (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berintegritas harus memenuhi dua karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan. Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan bergantung pada informasi tersebut. Beberapa periode terakhir banyak perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tanpa memikirkan faktor integritas, dapat dikatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut tidak benar dan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Kurangnya integritas laporan keuangan menyebabkan banyaknya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (2012) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang dilaporkan seharusnya disajikan secara benar, jujur dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Informasi akuntansi merupakan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan (2012) menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Hedrikson and Van Breda (2000) dalam Jama'an (2008) mengemukakan beberapa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yaitu *cost and benefit*, *relevance*, *reliability*, *comparability*, dan *materiality*.

Relevan (*relevance*) apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan dan mengubah pengharapan para pengambil keputusan. Reliabel (*reliability*) apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi bergantung pada informasi tersebut. Berkualitas andal jika bebas dari kesalahan material, menyesatkan dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya.

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang telah terstruktur dari posisi keuangan maupun kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2019). Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan juga perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi

para pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi (Harahap, 2017). Paminto, dan Ramadhani (2017) mendefinisikan bahwa integritas laporan keuangan merupakan suatu penyajian serta pengungkapan laporan keuangan dengan di dalamnya berisikan data-data akuntansi yang mampu menggambarkan realitas sesungguhnya dari ekonomi perusahaan yang diungkapkan dengan jujur tanpa ada yang ditutupi.

Namun, pada kenyataannya banyak terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi khususnya pada laporan keuangan. Banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Kasus manipulasi akuntansi ini melibatkan sejumlah perusahaan besar di berbagai belahan dunia seperti yang terjadi di Indonesia seperti PT. Kimia Farma dan Bank Lippo yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007).

Secara umum Bursa Efek merupakan pasar saham yang terorganisasi, mempertemukan antara penjual dengan pembeli yang akan terjalin komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli saham atau surat berharga dengan aturan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, BEI memperjualbelikan saham yang merupakan bukti kepemilikan perusahaan seseorang, karena menyetero penyertaan modal. Beberapa kasus yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terdapat beberapa skandal dan penyimpangan akuntansi dan laporan keuangan diantaranya adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), dan PT. Kratakau Steel (Persero) Tbk.

Fenomena yang pertama yaitu kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), yang merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nama PT SNP Finance menjadi sorotan otoritas keuangan dan kurang lebih 18 Periode ini ternyata berada di ambang kepailitan. Perusahaan pembiayaan yang berada di berada di bawah naungan Columbia Group tersebut di atas kertas terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Ranting utang perseroan sempat mendapatkan rating A atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan berubah drastic dari stabil menjadi SD (selective default) pada 9 Mei 2018 lantaran salah satu kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018. Diduga, pihak SNP Finance tidak benar alias fiktif, sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan atau warning sebelum gagal bayar terjadi. Persoalan laporan keuangan ini sangat vital dan seringkali keruwetan bagi sebuah perusahaan bila tidak dikelola dengan baik.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencoba mengambil upaya mitigasi, yakni mengusulkan agar direktur keuangan selaku penyelenggara laporan keuangan wajib memiliki sertifikat sebagai pihak yang diaudit (auditee). BEI menilai setifikasi terhadap auditee cukup penting untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan kinerja keuangan. Selain itu, BEI juga mengusulkan kriteria dari setifikasi itu, yakni independen dan tidak memiliki ikatan keluarga. Usul dari

BEI ini mendapatkan dukungan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dunia usaha juga turut mendukung agar direktur keuangan memiliki standard dan kompetensi khusus dalam membuat laporan keuangan. (www.tirto.id : 2018).

Dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), kurang baik dalam pelaporan keuangan, mengingat bahwa dari waktu ke waktu sering terjadi kegagalan pembayaran bunga MTN, serta diduga bahwa SNP Finance bersifat fiktif sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan atau warning sebelum gagal bayar terjadi.

Fenomena yang terjadi dapat membuktikan bahwa kurang integritasnya laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Penyajian laporan tidak melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Apabila laporan keuangan itu overstate akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Hardiningsih, 2010).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang

jujur dan disajikan secara wajar. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan benar dan jujur apabila sesuai dengan karakteristik *faithful representation* dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin dikenal masyarakat, yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi perusahaan maka dari itu integritas pelaporan berpengaruh positif terhadap perusahaan. (Mutia dkk, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Fenomena yang terjadi pada saat ini banyaknya kasus manipulasi data keuangan yang banyak terjadi pada badan usaha dan perusahaan di Indonesia yang membuktikan bahwa kurang integritasnya laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Sejak terjadinya skandal manipulasi pembukuan di Amerika Serikat yang merupakan kasus penipuan terbesar sekaligus kepailitan terdahsyat dalam sejarah perekonomian di Amerika Serikat, maka integritas dari laporan keuangan menjadi dipertanyakan, apakah laporan keuangan tersebut disajikan dengan jujur dan menunjukkan informasi

yang benar, yang berarti angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa adanya dan benar – benar terjadi. Pentingnya integritas laporan keuangan bagi *stakeholder* semakin menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Karena laporan keuangan adalah sumber informasi yang kompeten bagi stakeholder.

Faktor pertama adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional adalah Persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Kepemilikan institusional memiliki fungsi monitor melalui hak kepemilikan saham, dan hak tersebut juga mempengaruhi cara perusahaan dijalankan.

Umumnya komposisi kepemilikan institusional cukup besar (mayoritas), sehingga memiliki kemampuan monitoring lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan individual. Para pemilik institusional menginginkan reputasi perusahaan yang lebih baik agar meningkatkan nilai pasar perusahaan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengawasan tersebut maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Hasil penelitian Hidayanti dan Paramita (2014) menemukan bahwa jika kepemilikan institusional semakin besar, maka integritas laporan keuangan akan semakin

tinggi. Semakin banyak proporsi kepemilikan institusional dapat mendorong manajer untuk memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang diwujudkan dengan terciptanya pengawasan yang efektif sehingga laporan keuangan yang dibuat manajemen memiliki integritas yang tinggi, tetapi menurut Gayatri dan Saputra (2013), Priharta (2017) bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan

Faktor kedua kepemilikan manajerial sebagai kontrol atas tindakan manajemen dan membuat manajemen waspada dalam membuat keputusan dikarenakan manajemen memiliki saham perusahaan, sehingga tidak ingin mengalami kerugian. Tanggung jawab manajer menjadi lebih luas dan besar dalam mengurus perusahaan dan menyusun laporan keuangan yang jujur serta sesuai keadaan ekonomi perusahaan agar tercipta laporan keuangan yang berintegritas maka dari itu kepemilikan manajerial berpengaruh positif kepada integritas laporan keuangan (Arista,dkk, 2018). Laporan keuangan yang berintegritas dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta tata kelola yang baik yang diterapkan dalam entitas tersebut. dengan adanya kepemilikan manajerial, dapat mendorong pengelola perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan diungkapkan dalam laporan Periodean. dengan demikian perusahaan memenuhi prinsip akuntabilitas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingannya (Yoremia, 2016). Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan, maka diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang menyimpang dalam penyusunan hingga penyajian laporan keuangan

sehingga informasi laporan keuangan yang disajikan benar dan jujur, tetapi menurut penelitian Arvida (2013) dan Azzah dkk., (2021) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan, karena Rendahnya kepemilikan saham manajerial akan membuat integritas laporan keuangan menjadi rendah. Sehingga manajemen bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. akan menimbulkan permasalahan keagenan/ konflik agensi diantara kedua belah pihak.

Menurut penelitian Yoremia (2016), dan Silvia (2018), tata kelola perusahaan juga termasuk kedalam kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan Manajerial adalah Salah satu mekanisme corporate governance yang dapat meminimalkan konflik keagenan agar tercapai nilai yang bermanfaat bagi semua pihak ialah dari sisi kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial berarti manajer memiliki saham dalam perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan manajer cenderung mengambil keputusan terbaik bagi pemegang saham agar ia juga tidak dirugikan (Yoremia, 2016). Habibie (2017) menyatakan kepemilikan saham yang tinggi oleh manajerial akan membuat manajer merasakan secara langsung dampak dari keputusan yang diambilnya termasuk konsekuensi atas keputusan yang salah oleh pihak manajer. dengan demikian, manajer cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan laporan keuangan secara jujur dan benar sehingga laporan keuangan menjadi lebih berintegritas.

Faktor ketiga adalah Komisaris Independen, Daniel (2015) mengatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Yoremia, 2016), dan menurut Linata dan Sugiarto (2012) Proporsi Komisaris Independent tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan, Dimana jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan-badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan tetapi jika keadaan itu tidak terjadi akan memberikan dampak sebaliknya.

Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung memiliki yang berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Terkait dengan integritas laporan keuangan, terdapat penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara komisaris independen dengan integritas laporan keuangan. Anita (2016) menyatakan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dan 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, tetapi menurut Ismail (2018) yang menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini menguji variabel mekanisme corporate governance yang berpengaruh pada terhadap integritas laporan keuangan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada pada berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian dengan populasi perusahaan BUMN, karena kebanyakan penelitian sebelumnya terkonsentrasi pada perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. BUMN adalah salah satu pilar ekonomi, karena beberapa BUMN berada dalam industri vital dan strategis sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia (Agrianti, 2009).

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan mampu untuk meningkatkan integritas laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Insitutional, Kepemilikan Managerial, Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Integritas Laporan Keuangan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 4) Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap intergeritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris adanya komisaris terhadap integritas laporan keuangan.

- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap intergeritas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaaat yang dapat diambil bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a) Bagi penelitian selanjutnya

Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik dari penelitian yang diteliti, dan menambah wawasan bagi penulis dalam penerapan teori dengan praktek yang sesungguhnya.

- b) Bagi pendidikan dan akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian akademisi terhadap pengembangan mengenai analisis terhadap laporan keuangan khususnya mengenai integritas laporan keuangan.

- c) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan tambahan, menambah ilmu, dan acuan kajian penulisan untuk dimasa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak investor mengenai perusahaan yang dapat digunakan

untuk mengambil keputusan ekonomi menyangkut kegiatan investasi.

b) Bagi pihak lain

Adanya perhatian yang lebih dari BEI dalam memperhatikan perusahaan- perusahaan yang mengalami kecurangan dan sebagai bahan informasi, masukan, dan acuan bagi pihak-pihak lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang serupa.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu, pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut *agent*. *Agent* (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Masalah keagenan adalah munculnya konflik kepentingan antara harapan investor dalam memperoleh *return* maksimal dan harapan manajer. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan investor menjadi optimal, ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri atau disebut tindakan moral hazard (Haryani dkk, 2011), Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Astria (2011) menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Akibat dari asimetri ini adalah *agent* mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal* (Agrianti, 2009). Adanya asimetri informasi ini dapat menimbulkan dua masalah potensial yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. Kedua masalah ini terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer selalu bertindak oportunistik, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk kepentingan manajemen dibandingkan yang terbaik untuk

kepentingan investor. *Adverse selection* terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih baik atau lebih lengkap tentang perusahaan dibandingkan investor. Sedangkan *moral hazard* terjadi karena perilaku manajemen yang tidak dapat diamati (Rozania et al., 2013). Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada *shareholders* bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan (Nicolin and Sabeni, 2013). Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku *agent* apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan juga memberikan informasi yang handal dan bermanfaat bagi *principal* yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan *principal* dengan *agent* dalam mengelola perusahaan (Setiawan, 2006). Keterkaitan teori agensi dengan integritas laporan keuangan adalah semakin ketatnya persaingan antara kedua belah pihak maka akan memicu para manajemen untuk berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan.

Masalah keagenan yang dihadapi dalam konteks perusahaan para investor mengacu pada kesulitan untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Yani, 2011). Menurut Jensen and Meckling (1976), penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencairan dana dan bagaimana dana tersebut diinvestasikan.

2.1.2 Integeritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang kondisi keuangan perusahaan atau aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) dalam PSAK No.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi tersebut serta menunjukkan rasa pertanggungjawaban pada manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Integritas laporan keuangan menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat, serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset,

liabilitas, pendapatan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2012). Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reability* (Kieso, 2008) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. *Reability* memiliki kualitas sebagai berikut:

a) Daya Uji (*Verifiability*)

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

b) Ketepatan Penyajian (*Representational Faithfulness*)

Angka dan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

c) Netralitas (*Neutrality*)

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Jama'an (2008) menyatakan laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas yang antara lain:

a) Kejujuran (*Faithfulness*)

Berarti bahwa terdapat kesesuaian antara ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban dinyatakan dalam laporan keuangan.

b) Dapat dipercaya (*Reliability*)

Bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang telah dilaporkan tersebut. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya jika informasi secara menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan, dan dapat diuji kebenarannya.

c) Netral (*Neutrality*)

Berarti bahwa informasi akuntansi harus netral, atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku pengguna informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi dalam akuntansi bersifat netral atau tidak bias.

Dalam penelitian Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Sedangkan Mulyadi (2004) dalam Jamaan (2008) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur dan seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Informasi akuntansi

yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan (Mayangsari, 2003). Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme dan manajemen laba. Menurut Mayangsari (2003) laporan keuangan yang dapat dipercaya atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management*. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih reliable apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Menurut Kusumawardhani (2012) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba. Investor institusional dapat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan karena hak *voting* yang mereka miliki. Hak *voting* tersebut mampu mengintervensi keputusan manajemen seperti keputusan investasi (Endraswati, 2006).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba tersebut. Investor institusional dikatakan sebagai investor yang *sophisticated* sehingga dapat melakukan fungsi *monitoring* secara lebih efektif dan tidak percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer seperti tindakan manajemen laba (Jao and Palung, 2011).

2.1.4 Kepemilikan Managerial

Menurut Endraswati (2012) kepemilikan manajerial merupakan saham-saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan seperti komisaris, direktur, dan direksi. Sedangkan menurut Pujianti dan Widanar (2009). Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris. Fungsi dewan komisaris dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate governance* (2001) adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*. Kepemilikan manajerial merupakan alat *monitoring* internal yang penting untuk memecahkan konflik agensi antara *external stockholders* dan manajemen (Agustia, 2018).

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin memaksimalkan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena manajemen semakin

memiliki tanggung jawab memenuhi keinginan manajemen (termasuk dirinya sendiri). Kepemilikan manajerial memiliki keterkaitan dengan masalah keagenan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial, mereka akan lebih peduli untuk mempercantik kinerja perusahaan sehingga mereka berusaha untuk mengurangi rasio keuangan dengan cara menjaga tingkat utang dan meningkatkan laba bersih.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Limantaw (2018) komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi, dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Undang-Undang No. 40 Periode 2007 pasal 120 ayat 2 Terbatas menguraikan bahwa komisaris independent diangkat berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya (Wijaya dan Febrianti, 2017). Jumlah komisaris independen wajib mewakili sedikitnya 30% dari jumlah Komisaris dalam Dewan Komisaris (Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.I.5).

Pihak yang ditunjuk sebagai dewan komisaris independen tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes dan Ardana, 2009). Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi bagaimana operasional perusahaan dijalankan oleh pengelola perusahaan, mengarahkan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh

perusahaan tidak melanggar dari ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Komisaris independen bersifat objektif sehingga dapat menjadi penengah jika terjadi konflik antar pihak internal perusahaan dan pihak pemegang saham (Imelia, 2015). Berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja, komite audit menyatakan bahwa komisaris independen yaitu:

- a) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.1.6 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit keuangan secara benar agar dapat berguna pada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengungkapan informasi ini melindungi para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi mereka. Selain itu, komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian implementasi GCG. Untuk

mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka perusahaan harus memiliki prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama dari aktivitas komite audit. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas komite audit sebagai berikut (Effendi, 2009)

1) Prinsip Independensi

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan beberapa anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit haruslah diumumkan ke masyarakat sebagai wujud terhadap sikap independensi mereka.

2) Prinsip Transparansi

Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja Periodean, serta rapat komite audit periodic yang didokumentasikan dalam setiap rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan.

3) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini ditunjukkan dengan frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit haruslah memiliki

kapasitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

4) Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip ini ditunjukkan aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik selain kepada dewan komisaris.

5) Prinsip Kewajaran

Prinsip ini ditunjukkan sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada sikap adil dan objektif terhadap semua pihak. Komite audit berkewajiban menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) Hasil penelitian Wardhani Dan Samrotun (2020) Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, ini diperoleh sampel sebanyak 54 sampel data dari populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2013-2018. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

- 2) Indrasti (2020) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Direksi Independen, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan baik secara individu maupun simultan terhadap integritas laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, dengan jumlah sampel 25 perusahaan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25.0 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan, sedangkan Dewan Direktur Independen dan Kebijakan Hutang tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan
- 3) Rizkiyah (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan *leverage*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan yang diukur dengan rasio MBV. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

- 4) Fajar dan Nurbaiti (2020) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh 60 unit sampel penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh variable independen berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan. Secara parsial kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independent tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap integritas laporan keuangan.

- 5) Permatasari (2020) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Populasi yang digunakan adalah 159 perusahaan dan sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga sebanyak 96 perusahaan diperoleh sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Periodean perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji-t, uji-F dan analisis koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan, variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* 2017-2019. Sedangkan, variabel Kepemilikan Manajerial dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.
- 6) Styawan (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 sampai 2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 104 sampel. Teknik analisis

data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap integritas laporan.

- 7) Priharta (2017) Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit) terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan industry manufaktur di Indonesia. Integritas laporan keuangan sebagai variabel bebas diprosikan dengan konservatisme. Sampel penelitian terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Dengan metode *purposive sampling* diperoleh 62 perusahaan sebagai sampel. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, sementara komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan, terhadap integritas laporan keuangan.
- 8) Dwidinda, Khairunnisa, Dan Triyanto (2017) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2012-2015 dan diperoleh sampel sebanyak 37 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis dari penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan aplikasi *eviews*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

9) Lerizki (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, independen komisaris, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan pada integritas keuangan surat pernyataan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tersebut Periode 2012 sampai dengan Periode 2014. Jumlah sampel yang digunakan adalah 250 perusahaan yang terdaftar yang diambil dengan pengambilan sampel yang bertujuan. Penelitian ini mengukur integritas laporan keuangan berdasarkan real aktivitas manajemen laba. Metode analisis penelitian ini menggunakan linier berganda analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

10) Darmawan (2018) Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit mengenai integritas laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah dari perusahaan ekspor di Bursa Efek Indonesia mulai

Periode 2014 sampai 2015. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 147 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.